

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kadula-Tambolaka- Kode Pos 87254

TAMBOLAKA

Kepada Yth:

: Bupati Sumba Barat Daya Melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya

Dari

: Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat Daya

Nomor

: PPO.422.2.16/..37.8./SBD/VII/2016

Tanggal

: 29 Juni 2016

Hal

: Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas Swasta Marapati

ISI NOTA DINAS

Telah Diteliti

Kepala Bagian Hukum

CHRISTOFEL HORO, SH PEMBINA TK. I

NIP. 19680225 199903 1 006

2. Asisten Pemerintahan Umum,

YOHANES TENDE, SH PEMBINA UTAMA MUDAJIV/c

NIP. 19661027 199703 1 006

MENGETAHUI /MENYETUJUI: Sekretaris Daerah

Kabupaten Sumba Barat Daya

Drs. A. UMBU ZAZA, M. Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19600207 198003 1 006 Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan konsep keputusan Bupati Sumba Barat Daya tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas Swasta Marapati.

Demikian kami sampaikan kepada Bapak untuk dapat diteliti baik dari segi materi maupun bentuknya dan dapat dipertimbangkan penerbitannya.

Atas bantuan bapak, kami ucapkan terimah kasih.

Kepala Dinas PPO
Kabupaten Sumi Barat Daya

DRA. YOHANA IHNOU LANG

PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19600719 198002 1 006



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 32 4KEP/HK/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA MARAPATI BUPATI SUMBA BARAT DAYA,

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, maka peran serta masyarakat dalam pengelolaan, pengendalian mutu layanan pendidikan perlu mendapat perhatian dan dukungan pemerintah kabupaten sumba barat daya;
- Bahwa untuk menyelenggarakan satuan pendidikan, Yayasan Pendidikan Marapati telah membentuk Team Persiapan Pendirian Sekolah Menengah Atas Swasta Marapati untuk melakukan Studi Kelayakan;
- c. Bahwa berdasarkan hasil Studi Kelayakan Tim Persiapan Pendirian Sekolah Menengah Atas Swasta Marapati merekomendasikan bahwa Sekolah Menengah Atas Swasta Marapati layak untuk manjadi satuan pendidikan;
- d. Bahwa bardasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Bupati Sumba Barat Daya tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas Swasta Marapati;

Mengingat:

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tembahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Privinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4692);
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Undang Undang Nomor
 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Perarturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5105), Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang
 Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36
 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan:

Permohonan Yayasan Pendidikan Marapati Nomor 015/YPM/P/DKK/III/2015 Tanggal 20 April 2015 Tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas Swasta Marapti.

· ci.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PENDIRIAN IZIN TENTANG KEPUTUSAN BUPATI

SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA MARAPATI.

KESATU

Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas Swasta Marapati.

KEDUA

Sekolah Menengah Atas Swasta Marapati yang selanjutnya disebut SMA SWASTA MARAPATI layak untuk di berikan Izin Pendirian terhitung mulai Tahun Pelajaran 2015/2016 dengan catatan Yayasan

segerah melengkapi syarat-syarat yang belum dipenuhi sebagaimana

diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

KETIGA

SMA SWASTA MARAPATI dalam menyelenggarakan proses Pendidikan Berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

46/63

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

> Ditetapkan di Tambolaka pada tanggal, 16 MEI 2012

Tembusan:

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik di Jakarta;
- Menteri Hukum dan HAM Republik di Jakarta;
- Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 4. Derektur Pembinaan SMA Ditjen Dikdasmen Pendidikan dan Kebudayaan Republik di
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Ketua Yayasan Pendidikan Marapati di Pemuda Desa Kalembu Kaha-Kota Tambolaka;
- Kepala SMA SWASTA MARAPATI di Pemuda Desa Kalembu Kaha-Kota Tambolaka.